

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Gereja menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah gedung (rumah) tempat berdoa dan melakukan upacara agama Kristen. Menurut Simanjuntak (2018) meskipun gereja adalah tubuh Kristus, umat Allah, dan persekutuan orang percaya, namun ia juga merupakan institusi (lembaga) yang membawa umat untuk bertumbuh dalam iman kepada Allah melalui Yesus Kristus, oleh firman-Nya. Gereja di Indonesia memiliki banyak aliran seperti gereja dengan aliran Pentakosta dan Protestan. Beberapa di antaranya gereja dengan aliran pentakostal yaitu Gereja Pentakosta di Indonesia (GPDI), Gereja Gerakan Pentakosta (GGP), Gereja Utusan Pentakosta (GUP), Gereja Pentakosta Pusat Surabaya (GPPS). Ada pula yang termasuk gereja Pentakosta akan tetapi tidak menggunakan kata pentakosta, seperti misalnya Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA), Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS), Gereja Isa Almasih (GIA), Gereja Bethel Indonesia (GBI), Gereja Bethany Indonesia, Gereja Tiberias Indonesia, dan Jemaat Kristen Indonesia (JKI) (Supatra, 2019). Dalam aliran pentakosta, gereja GBI secara umumnya menganut sistem Episkopal Sinodal yang berarti bahwa yang berkuasa dalam Gereja adalah Gembala Sidang, termasuk didalamnya mengelola keuangan (Pramesti dkk., 2018).

Adapun beberapa contoh gereja-gereja protestan *mainstream* atau protestan arus utama di Indonesia adalah HKBP, GKI, GPIB, GKJ, GKP, BNKP, HKI, GKPI, GKPS, GBKP, GMIT, GMIM dIII. Salah satu contoh gereja protestan yang diuraikan diatas yaitu Gereja Kristen Indonesia, yang

dengan keunikannya tersendiri berdiri diantara gereja-gereja yang lain. Salah satunya adalah Gereja Kristen Indonesia Merisi Indah, Surabaya, Jawa Timur dibangun atas dasar perkembangan jemaat GGS (Gereja Gereformeerd Surabaya) yang merupakan bagian dari GKI Pregolan Bunder yang berkembang dari tahun ke tahun. Gereja yang dibangun pada 31 Oktober 1990 ini semakin berkembang hingga kini telah dibangun gedung baru yang dinamakan gedung komisi yang baru diresmikan pada tahun 2019. Gedung yang berada disebelah gedung utama ini digunakan untuk kepentingan jemaat dalam jumlah kecil bersekutu dan juga sebagai tempat sekolah minggu (Kalampung dkk., 2020).

Gereja ini termasuk dalam organisasi nirlaba yang tujuannya tidak mencari keuntungan. Gereja memiliki karakteristik yang berbeda dengan organisasi nirlaba lainnya yakni setiap elemen dalam pengelolaannya didasarkan pada nilai-nilai sistem kepercayaan Relijiusitas Kristiani. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya perbedaan dalam kepemilikan aset, tujuan organisasi dan cara memperolehnya serta penggunaan sumber daya Gereja. Sumber penerimaan gereja berasal dari uang persembahan jemaat seperti juga pada gereja Merisi Indah. Apalagi saat ini gereja-gereja lebih berorientasi pada sisi keuangan untuk perkembangan gereja, menjadikan gereja tumbuh pesat dengan jumlah jemaat yang banyak, sumber dana yang melimpah dan kemegahan gedung gereja. Persembahan dari jemaat yang diterima gereja memiliki jumlah yang besar karena itu harus disertai pertanggungjawaban pengelolaan keuangannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Pdt. John Adi Palimbong, S.Th sebagai berikut (Manguma dkk., 2019):

“ persembahan merupakan tanda ungkapan syukur warga jemaat kepada Tuhan karena itu sistem kejujuran, kebenaran, dan rasa penuh tanggungjawab dalam mengelolanya itu harus kepada Tuhan dan kemudian kepada warga jemaat untuk mempertanggungjawabkan keuangan tersebut secara tertulis. “

Pernyataan tersebut menyatakan dibutuhkan pelaporan keuangan dalam menjalankan suatu gereja. Pelaporan organisasi nirlaba seperti gereja berbeda dengan organisasi yang berorientasi pada laba. Dalam menjalankan kegiatannya, organisasi nirlaba tidak semata-mata digerakkan oleh tujuan untuk mencari laba. Perbedaan karakteristik nirlaba dan bisnis terdapat pada standar laporan keuangannya. Akan tetapi, tujuan organisasi nirlaba dan organisasi bisnis tidak memiliki perbedaan dalam tujuan dan fungsi pembuatan laporan keuangan atau akuntansi. Tujuan pembuatan laporan keuangan sebuah organisasi adalah mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Oleh karena itu, secara prinsip akuntansi kedua organisasi memiliki kesamaan tetapi format atau standar akuntansi berbeda karena perbedaan karakteristik organisasi. Selain itu, organisasi nirlaba harus melaporkan perkembangan pendanaan organisasi kepada *stakeholders* sehingga *stakeholders* dapat melakukan pengawasan secara terbuka kepada organisasi.

Pada pelaporan keuangan gereja sebagai organisasi Nirlaba harus berdasarkan PSAK No. 45. Unsur-unsur laporan keuangan tersebut terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang

tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 bertujuan agar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan lebih jelas, relevan dan memiliki daya banding yang tinggi, selain itu juga agar tujuan dari penyusunan laporan keuangan dapat tercapai dengan maksimal.

Salah satu cara untuk melakukan kontrol terhadap pelaporan keuangan adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah salah satu unsur dari pelaksanaan *Good Governance* yang harus dicermati oleh setiap organisasi agar dipercaya *stakeholder*. Akuntabilitas publik adalah kewajiban penerima tanggungjawab untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandate (*principal*)(Syerly dkk., 2018). Akuntabilitas merupakan isu penting dalam kajian dan praktek dalam gereja karena publik menaruh perhatian besar terhadap pelaksanaan kebijakan, program aktivitas yang merupakan konsekuensi wajar dari persembahan jemaat yang diberikan. Hal ini sejalan dengan pendapat Wijaya dkk (2020) yang menyatakan akuntabilitas dalam organisasi nirlaba sangat diperlukan. Pertanggungjawaban kinerja dalam organisasi nirlaba diharapkan transparan dan akuntabel agar para pemberi sumber daya dapat memastikan bahwa sumber daya yang mereka berikan telah digunakan sebagaimana mestinya.

Keterbukaan praktik akuntabilitas dalam organisasi gereja sangatlah penting dalam pertanggungjawaban atas dana yang dikelola oleh organisasi tersebut kepada Kristus sebagai kepala gereja, jemaat

maupun donatur sebagai penyumbang dana. Pada organisasi gereja akuntabilitas terdiri dari dua macam yakni akuntabilitas vertikal dan horizontal. Pada organisasi gereja, akuntabilitas vertikal merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Tuhan. Sedangkan, akuntabilitas horizontal dalam organisasi gereja merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada jemaat, pengurus gereja yang lain, serta gembala sidang gereja (Sukmawati dkk., 2016). Sedangkan menurut Manguma dkk (2019) Akuntabilitas keuangan dimaknai dalam bentuk pertanggungjawaban pihak Gereja kepada jemaatnya dengan pencatatan laporan keuangan yang transparan yang tersedia dalam bentuk warta jemaat demi membangun rasa kepercayaan antara agen dan prinsipal sehingga persembahan yang diberikan jemaat kepada Tuhan sebagai wujud ungkapan syukurnya digunakan dan dikelola sebaik mungkin untuk keperluan Gereja dan dengan mengelola keuangan Gereja dengan jujur dan penuh rasa tanggungjawab juga merupakan pertanggungjawaban pihak Gereja kepada Tuhan karena diberikan kepercayaan untuk mengelola keuangan tersebut.

Berdasarkan pendapat mengenai pentingnya akuntabilitas menyimpulkan bahwa penerapan akuntansi dalam gereja harus dapat memberikan informasi yang akurat, peranan akuntansi tersebut nantinya akan berguna bagi manajemen (pimpinan) gereja dalam fungsi perencanaan dan fungsi pengawasan serta dalam pengambilan keputusan. Sehingga pengelolaan keuangan gereja yang baik perlu memperhatikan bagaimana gereja mengelola keuangannya dan mengupayakan informasi keuangan gereja. Dalam akuntabilitas tata cara

pengelolaan keuangannya gereja dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban yang efektif dan efisien melalui praktik akuntabilitas yang dilakukannya. Untuk itu, gereja harus dan berkewajiban melaporkan keadaan keuangannya yang akuntabel agar jemaat yang adalah sumber utama dari pendapatan gereja serta para donatur yang berasal dari luar gereja termotivasi untuk memberikan persembahan syukur serta bantuan dana guna dalam menopang pelayanan dan kegiatan gereja. Dalam mengupayakan dan mengatur perolehan dana gereja membutuhkan manajemen keuangan yang baik sebagai fungsi perencanaan maupun fungsi pengawasan dalam pengelolaan keuangan serta pengambilan keputusan.

Penelitian akuntabilitas keuangan gereja telah dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti penelitian Raya (2017) yang menyatakan akuntabilitas pelaporan keuangan yang menjadi syarat untuk mewujudkan kredibilitas gereja telah dilakukan oleh paroki yaitu dengan gereja Katolik Paroki St. Paulus Miki Salatiga telah rutin dalam mengirimkan laporan keuangan bulanan maupun satu periode beserta RAPB dan RAI kepada Keuskupan sebagai pertanggungjawaban ke atas yang diaudit oleh Ekonomat KAS dan kepada umat paroki sebagai pertanggungjawaban ke bawah yang kemudian dibahas pada Rapat Pleno dan dihadiri perwakilan umat dan ketua ketua kelompok kategorial. Selanjutnya penelitian Manguma dkk (2019) menyatakan ada 3 akuntabilitas yang dimaknai dalam Gereja Toraja Jemaat Tallunglipu yaitu pertama akuntabilitas keuangan yang dimaknai dalam bentuk pertanggungjawaban pihak Gereja kepada jemaatnya dengan pencatatan laporan keuangan yang transparan

melalui warta jemaat dan yang kedua adalah akuntabilitas transendental atau pertanggungjawaban kerohanian yang dimaknai dalam bentuk kegiatan/aktivitas yang dilakukan oleh pihak Gereja dalam memenuhi tugas pelayanannya salah satunya untuk melayani sesama dan yang ketiga yaitu akuntabilitas horizontal yang dimaknai sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak Gereja yang luar biasa kepada jemaatnya dalam bentuk diakonia.

Salah satu faktor yang lain yang perlu diwujudkan dalam suatu gereja agar dapat beroperasi dengan baik dan sesuai, serta menjaga kegiatan secara profesional harus ditunjang dengan pengendalian internal yang baik dan benar pula. Secara luas pengendalian internal didefinisikan sebagai proses yang dipengaruhi oleh dewan entitas direksi, manajemen dan personel lain, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam kategori efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Irawati & Satri, 2017). Sedangkan menurut Putri dkk (2017) pengendalian internal merupakan proses dimana kinerja dari sebuah perusahaan itu diteliti, dicek, dan diperiksa demi memajukan efisiensi didalam sebuah perusahaan.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan pengendalian internal adalah suatu cara yang berisi seperangkat kebijakan dan peraturan untuk mengarahkan, mengawasi dan melindungi sumber daya perusahaan agar terhindar dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan dan penyelewengan. Unsur ini juga yang dibutuhkan di gereja agar pengelolaan keuangan bisa menjadi transparan dan jemaat mengetahui tentang

keuangan di gereja. Pramesti dkk (2018) berpendapat apabila pengendalian internal pada sebuah organisasi lemah maka kemungkinan terjadinya *fraud* dan kesalahan sangat besar, begitu juga sebaliknya ketika pengendalian yang diterapkan kuat maka kemungkinan terjadinya *fraud* dan kesalahan dapat diperkecil, walaupun *fraud* dan kesalahan masih terjadi, tetapi hal tersebut dapat diketahui lebih cepat dan dapat segera diatasi. Pengendalian internal dalam gereja ini umumnya dibedakan menjadi dua yaitu organisasi yang dinilai berdasarkan tingkat sentralisasi administrasi dan gaya kepemimpinan.

Pada penelitian Senga & Kristianti (2019) diperoleh lima organisasi keagamaan di Kota Salatiga memiliki hasil pengendalian internal yang mana dua dari lima organisasi keagamaan memiliki tingkat pengendalian internal yang berada di atas rata-rata keseluruhan organisasi sehingga dapat dikatakan organisasi cenderung memberikan sedikit kebebasan untuk menetapkan kebijaksanaan dalam administrasi. Tiga organisasi lainnya memiliki total keseluruhan skor pengendalian internal yang lebih rendah atau dibawa rata-rata sehingga organisasi ini cenderung desentralisasi dalam administrasi dan memungkinkan para pemimpin mereka memiliki cukup banyak kebijaksanaan dalam urusan administrasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perlu juga melihat pengendalian internal di GKI Merisi Indah agar bisa mengevaluasi keterlaksanaan gereja saat ini.

Penjelasan tentang pentingnya akuntabilitas dan pengendalian internal ini di gereja juga untuk menghindari kasus-kasus penyelewengan dana gereja. Salah satu kasus penyelewengan dana gereja seperti kasus

penggunaan persembahan untuk kepentingan pribadi yang dilakukan oleh pendeta salah satu gereja di Surabaya sebesar Rp 4,7 triliun (Wibowo & Kristanto, 2017). Kasus yang telah terjadi ini menunjukkan semakin pentingnya akuntabilitas dan pengendalian internal di gereja terutama pada GKI Merisi Indah Agar mengantisipasi terjadi penyelewengan.

Sebagai salah satu bentuk organisasi nirlaba, GKI Merisi indah mendapatkan sumber pendanaan dari tiga jenis penerimaan, yaitu penerimaan rutin (mingguan), penerimaan bulanan dan penerimaan khusus. Seluruh penerimaan tersebut diperoleh secara sukarela yang diberikannya dari jemaat gereja, donatur, maupun pihak lain yang ingin berkontribusi bagi pembangunan dan operasional gereja. Di dalam gereja, pengelolaan keuangan diatur oleh majelis sebagai pemegang tanggung jawab.

Peneliti melihat fenomena terkait akuntabilitas dan pengendalian internal keuangan organisasi nirlaba keagamaan masih ada yang belum terwujud, salah satu fenomena terdapat pada penelitian Prabowo & Kurniasih (2019) yang menemukan hasil terdapat kekurangan dari pengendalian internal GKJ Wedi adalah di dalam lingkungan pengendalian, pengelola dalam GKJ wedi tidak kompeten sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan. Kedua, tidak adanya pemisahan tugas dalam beberapa bagian. Hal ini dapat dilihat dari kewenangan bendahara untuk menyimpan dan mencatat keuangan Gereja, sehingga memungkinkan terjadinya kecurangan.

Berdasarkan penelitian tersebut evaluasi sistem pengendalian internal atas pengelolaan keuangan gereja menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Hal ini dikarenakan, peneliti dapat menilai penerapan sistem pengendalian internal atas pengelolaan kas untuk meminimalisasi kerugian dan risiko atas penyalahgunaan kas di sebuah organisasi. Selain itu, dengan mengevaluasi sistem pengendalian internal akan dapat membantu organisasi menilai sejauh mana sistem pengendalian internal menunjang tercapainya tujuan organisasi.

Akuntabilitas dan pengendalian internal ini perlu ditelaah dalam gereja karena kegiatan pengendalian diperlukan untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif berdasarkan kebijakan atau prosedur yang ada. Akuntabilitas juga bisa meningkat apabila kegiatan pengendalian dilakukan secara rutin dan berkala untuk meminimalisasi tindakan kecurangan dan mengontrol semua unit gereja agar sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ada sehingga akuntabilitas tercapai. Hal ini menunjukkan kedua faktor ini saling terhubung dalam pelaporan keuangan gereja. Apalagi Dalam suatu organisasi nirlaba khususnya gereja, kadang bisa terjadi penyampaian informasi yang tidak sesuai dengan kondisi gereja sebenarnya, yang biasa disebut sebagai informasi yang tidak simetris atau asimetri informasi (information asymmetric). Terlebih lagi, seringkali pengelolaan keuangan dalam organisasi keagamaan merupakan daerah dimana hampir tidak ada pengawasan yang signifikan dari pemerintah sehingga lebih mendukung lagi dibutuhkannya akuntabilitas dan pengendalian internal.

Sebagai salah satu gereja yang mengalami pertumbuhan pesat , GKI Merisi Indah dituntut untuk mampu mengimplementasikan nilai akuntabilitas dan pengendalian internal dalam setiap kegiatan operasionalnya, termasuk dalam hal pelaporan keuangan. Berdasarkan fakta dan uraian tersebut, peneliti ingin melihat bagaimana perenrapan konsep dan salah satu prinsip tata kelola yang baik pada organisasi nirlaba, dalam hal organisasi keagamaan (gereja). penelitian ini ingin membahas bagaimana akuntabilitas dan pengendalian internal dari GKI Merisi Indah dalam hal mengelola keuangan dari jemaat maupun dari sumber lainnya dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang mewakili paham naturalistik (fenomenologis). Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Akuntabilitas dan Pengendalian Internal Pada GKI Merisi Indah Dengan Pendekatan Kualitatif”** untuk dapat lebih mengetahui sejauh mana pengimplementasian akuntabilitas dan pengendalian internal dalam pelaporan keuangan GKI Merisi Indah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah yang ditetapkan yaitu:

1. Bagaimana akuntabilitas keuangan yang ada di GKI Merisi Indah?
2. Bagaimana pengendalian internal yang diterapkan di GKI Merisi Indah?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui akuntabilitas keuangan pada GKI Merisi Indah serta menganalisis pengendalian internal yang telah diterapkan di GKI Merisi Indah.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang didapat dari penelitian diatas yaitu:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai akuntabilitas dan pengendalian internal pada organisasi nirlaba dengan baik. Serta dapat memberikan pemahaman mengenai pengelolaan manajemen keuangan yang baik, dengan melakukan pencatatan keuangan agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan keuangan yang akan datang.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya, yang memiliki hubungan dengan pembahasan pada penelitian.

3. Manfaat Akademis

Menambah pengetahuan mengenai akuntabilitas dan pengendalian internal pada organisasi nirlaba khususnya pada organisasi gereja